

POLISI DITUDING INTIMIDASI KELUARGA SIYONO

Kapolri mempersilakan
ada autopsi ulang.

Dewi Suci Rahayu

dewi.suci@tempo.co.id

JAKARTA — Temuan sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memperkuat dugaan adanya intimidasi oleh anggota Detasemen Khusus 88 kepada keluarga Siyono, terduga teroris asal Klaten yang tewas saat diselidiki kesatuan antiteror itu. "Keluarganya mengaku mendapat tekanan untuk menandatangani surat supaya tidak menuntut Siyono diautopsi," kata Koordinator Sub-Komis Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriani saat dihubungi *Tempo*, kemarin. "Bapaknyaini tidak bisa baca, jadi asal tanda tangan gitu."

Menurut Siane, ayah Siyono, Marso, dan Wagiyono, kakak Siyono, terpaksa menandatangani surat tersebut dengan iming-iming santunan. Saat ini, kata Siane, Densus sepeertinya sedang mencari istri Siyono, Suratmi, untuk menandatangani surat serupa. Suratmi masih menghindari dan dikabarkan bersembunyi. "Dia (Suratmi) akan mengungkap hal besar. Dia akan menuntut keadilan kematian suaminya," ujar Siane.

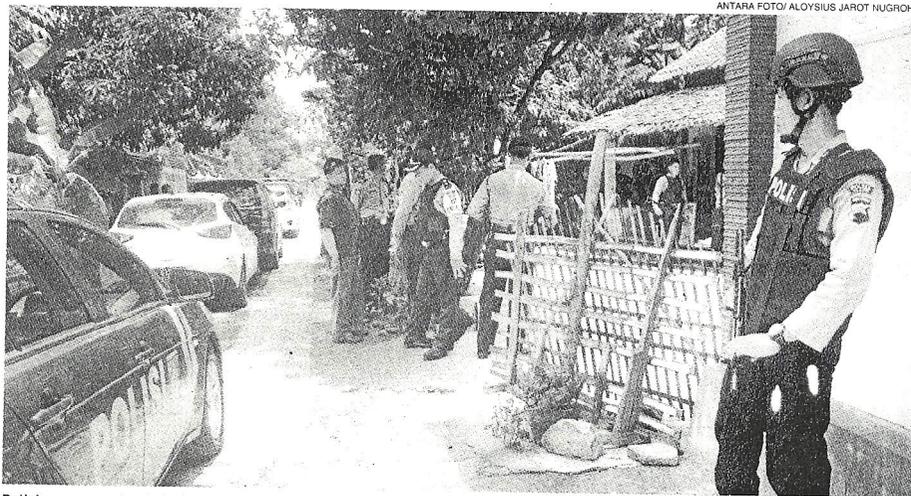
Siane menjelaskan, anggota Densus telah memberikan uang segepok kepada Suratmi sebagai bantuan biaya hidup sehari-hari. Uang tersebut diberikan saat menandatangani penyerahan jenazah Siyono di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat

itu, anggota Densus juga telah meminta Suratmi menandatangani surat persetujuan untuk mengklarifikasi kematian suaminya. Tapi Suratmi menolaknya.

Anggota Densus juga memberikan uang segepok kepada Wagiyono untuk mengurus jenazah Siyono. Wagiyono belum mengetahui jumlah uang tersebut. "Sampai sekarang, mereka tidak membuka uang itu. Mereka akan mengembalikannya dalam waktu dekat," tutur Siane.

Komnas HAM akan menggandeng sejumlah lembaga untuk menuntut Polri segera mengautopsi ulang jenazah Siyono. Beberapa lembaga yang akan digandengnya adalah Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia serta Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Kami sudah mendapat dukungan dari mereka. Kami akan rapat pada pekan depan," dia menambahkan.

Desakan untuk autopsi ulang jenazah Siyono bukan tanpa alasan. Menurut Siane, Komnas HAM menemukan sejumlah keanehan pada jenazahnya. Di antaranya, terdapat darah di kepala bagian belakang, hidung patah, mulut berdarah, bekas ikatan pada kaki hingga bengkok, serta salah satu suku jari kaki hampir lepas. Selain itu, larangan membuka jenazah sangat dada dan perut yang tertutup kapas memperkuat kecurigaan Komnas HAM. "Nah, ini ada apa? Kami



Polisi mengamankan lokasi saat akan mengeledah rumah Siyono di Brengkungan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, 10 Maret lalu.

DUA VERSI KEMATIAN SIYONO

Kematian Siyono, seorang terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah, pada 10 Maret lalu, berbuntut panjang. Polisi menyebut pria 33 tahun itu mering nyawa setelah berkelahi dengan personel Densus 88 yang mengawalnya ketika menuju wilayah Candi Prambanan. Komnas HAM, KontraS, dan keluarga ragu akan klaim itu. Inilah dua versi cerita soal kematian dan penyebabnya.

VERSI POLISI:

➤ Seorang personel Densus 88 Antiteror membawa Siyono ke wilayah Candi Prambanan, Kamis, 10 Maret 2016, dengan kondisi mata ditutup dan tangan diborgol.

➤ Anggota Densus sempat membuka penutup mata dan borgol Siyono. Tiba-tiba Siyono mengamuk di dalam mobil. Dia menyerang sopir dan personel Densus yang mengawalnya. Ia sempat menendang kursi sopir sehingga membuat mobil oleng ke kanan.

➤ Polisi melawan dengan membenturkan kepala Siyono ke sisi mobil hingga lemas dan pingsan. Siyono tewas dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta.

➤ Polisi melakukan visum. Menurut Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jenderal Arthur Tampi, Siyono tewas akibat perdarahan di rongga kepala bagian belakang. Ada luka mekar di wajah, tangan, dan kaki Siyono.

VERSI LAIN (KOMNAS HAM, KONTRAS, DAN KELUARGA SIYONO):

➤ Densus 88 Antiteror menangkap Siyono tanpa surat penangkapan. Kepada keluarga, Densus menyebut Siyono ditangkap karena masalah utang. Dua hari setelah penangkapan, anggota Densus mengeledah rumahnya tanpa surat izin pengeledahan.

➤ Densus 88 memberi kabar duka Siyono tanpa menjelaskan musabab kematiannya. Densus hanya meminta keluarga mengambil jenazah Siyono di Rumah Sakit Polri, Jakarta.

➤ Ketika menjemput jenazah, istri Siyono hanya diminta menandatangani berita acara serah-terima jenazah tanpa penjelasan musabab kematian.

➤ KontraS menyebutkan luka Siyono tak sesuai jika memang berkelahi dengan satu orang atau karena benturkan ke badan mobil. Sebab, ada memar pipi, mata lebam, hidung patah, kaki dari paha hingga betis bengkok dan memar, kuduk kaki hampir patah, serta keluar darah dari belakang kepala.

➤ KontraS menduga ada penyiksaan terhadap Siyono.

➤ Komnas HAM punya temuan serupa. Larangan membuka jenazah bagian dada dan perut Siyono yang tertutup kapas memperkuat kecurigaan itu. ● INDRANA WILAJA

akan mengajukan autopsi secara medis supaya hasilnya akurat," kata Siane.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melansir dugaan adanya intimidasi dari Polri dalam kasus tewasnya Siyono. "Mereka disuruh tanda tangan surat pernyataan tidak akan menuntut," kata Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, saat konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu lalu. Pihak keluarga pun tidak memiliki kebebasan untuk memilih kuasa hukum.

KontraS juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam kasus ini. Polisi menangkap Siyono setelah menunaikan salat di masjid dekat rumahnya, di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia ditangkap di depan orang tuanya, dan hanya mengatakan Siyono sedang terlibat masalah utang. Dua hari bersejajar, petugas mengeledah rumahnya. Penangkapan dan pengeledahan itu tidak dilengkapi dengan surat keterangan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menampik tuduhan bahwa Densus menyiksa Siyono dan mengintimidasi keluarganya. Ia menduga Siyono berusaha melawan petugas sehingga terjadi perkelahian dan menyebabkannya tewas. Jika korban disiksa, kata dia, anggota Densus

yang mengawalnya tidak akan ikut babak belur. "Itu (penyiksaan) tidak mungkin dilakukan," ujar Badrodin.

Badrodin mengakui ada kesalahan prosedur karena personel Densus melepas borgol Siyono. Ia mengaku akan menyelidiki dugaan intimidasi anak buahnya kepada keluarga korban. Badrodin mempersilakan jika ada keinginan untuk mengautopsi ulang jenazah Siyono. "Ya, boleh. Silakan saja kalau memang diperlukan. Autopsi ulang saja," ujarnya.

Putri Kanesia meminta DPR mengevaluasi kinerja Densus 88 dan mengkaji kembali draf revisi Undang-Undang Antiterorisme. "Tidak ada satu pasal yang mengatur mekanisme ganti rugi bila Densus 88 salah tangkap," kata Putri.

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Mahesa Junaidi mendukung usulan KontraS untuk memberikan sanksi kepada aparat yang salah tangkap atau menyiksa sasarannya. Menurut dia, bila terbukti melanggar, petugas tersebut harus dikenai sanksi. "Kalau sudah menyebabkan kematian, sanksinya pidana. Negara juga harus ganti rugi terhadap keluarganya," ujar Desmond.

Desmond setuju atas adanya usulan pasal yang mengatur sanksi bagi para aparat yang salah tangkap atau menyebabkan kematian saat penangkapan. "Fraksi Gerindra berjuang untuk itu," tutur Desmond.

● DEWI SUCI RI | MAYA ANU P | AHMAD FAZ